

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Perhubungan  
Kabupaten Batu Bara  
Tahun 2023



# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Datuk Tanah Datar, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEHUBUNGAN**

**KABUPATEN BATU BARA**

**RUBI ANTO SARI SIBORO, ST. M.Si**

Pembina

NIP. 19791213 200804 1 001

## DAFTAR ISI

<u>Kata Pengantar</u> .....	ii
<b><u>DAFTAR TABEL</u></b> .....	iii
<b><u>DAFTAR GAMBAR</u></b> .....	iv
<b><u>BAB I</u></b> .....	1
<u>Pendahuluan</u> .....	1
<u>I.1 Struktur Organisasi</u> .....	2
<u>I.2 Tugas dan Fungsi</u> .....	3
<u>I.3 Isu – isu Strategis</u> .....	3
<u>I.4 Keadaan Pegawai</u> .....	4
<u>I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana</u> .....	6
<u>I.6 Keuangan</u> .....	8
<u>I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</u> .....	9
<b><u>BAB II</u></b> .....	10
<u>Perencanaan &amp; Perjanjian Kinerja</u> .....	10
<u>II.1 Perencanaan Strategis</u> .....	10
<u>a. Visi dan Misi</u> .....	11
<u>b. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara</u> .....	13
<u>c. Strategi Program dan Kegiatan</u> .....	14
<u>II.2 Perjanjian Kinerja</u> .....	22
<u>II.3 Rencana Anggaran Tahun 2023</u> .....	25
<u>a. Target Belanja Dinas Perhubungan</u> .....	26
<u>b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis</u> .....	28
<b><u>BAB III</u></b> .....	28
<u>Akuntabilitas Kinerja</u> .....	28
<u>III.1 Capaian Kinerja Tahun 2023</u> .....	29
<u>III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis</u> .....	30
<u>III.2 Akuntabilitas Keuangan</u> .....	48
<u>a. Realisasi Anggaran</u> .....	48
<b><u>BAB IV</u></b> .....	51
<b><u>PENUTUP</u></b> .....	51

## DAFTAR TABEL

<u>Tabel I. 1 Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2023</u> .....	4
<u>Tabel I. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2023</u> .....	4
<u>Tabel I. 3 Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2023</u> .....	5
<u>Tabel I. 4 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan</u> .....	7
<u>Tabel I. 5 Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023</u> .....	8
<u>Tabel II. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Batu Bara 2019-2023</u> .....	11
<u>Tabel II. 2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan</u> .....	14
<u>Tabel II. 3 Strategi, Program dan Kegiatan</u> .....	15
<u>Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023</u> .....	23
<u>Tabel II. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023</u> .....	24
<u>Tabel II. 6 Target Belanja Dinas Perhubungan APBD Perubahan Tahun 2023</u> .....	26
<u>Tabel II. 7 Anggaran Dinas Perhubungan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023</u> ...	26
<u>Tabel II. 8 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis</u> .....	28
<u>Tabel III. 1 Skala Nilai Pringkat Kinerja</u> .....	29
<u>Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan</u> .....	30
<u>Tabel III. 3 Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023</u> .....	31
<u>Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023</u> .....	31
<u>Tabel III. 5 Database Sarana dan Prasara Jalan Kabupaten</u> .....	34
<u>Tabel III. 6 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di kabupaten Batu Bara</u> .....	39
<u>Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023</u> .....	46
<u>Tabel III. 8 Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah</u> .....	46
<u>Tabel III. 9 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023</u> .....	48

## DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar III. 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023</u> .....	32
<u>Gambar III. 2 Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Sorot</u> .....	35
<u>Gambar III. 3 Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas dan Speed Bump</u> .....	36
<u>Gambar III. 4 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan</u> .....	36
<u>Gambar III. 5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</u> .....	38
<u>Gambar III. 6 Pengawasan dan Sosialisasi Parkir</u> .....	39
<u>Gambar III. 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB</u> .....	40
<u>Gambar III. 8 Penyediaan Bukti Lulus Uji PKB</u> .....	41
<u>Gambar III. 9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB</u> .....	42
<u>Gambar III. 10 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas</u> .....	43
<u>Gambar III. 11 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar</u> .....	43
<u>Gambar III. 12 Kegiatan di Perairan</u> .....	45

# BAB I

## Pendahuluan

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **I.1 Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara yang membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - (2) Sub Bagian Keuangan dan Program
  - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
    - (1) Kelompok Substansi Pengujian Sarana
    - (2) Seksi Lalu Lintas
    - (3) Seksi Angkutan
  - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
    - (1) Seksi Prasarana
    - (2) Seksi Keselamatan
    - (3) Kelompok Substansi Pengembangan
  - d. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
  - e. UPT Terminal
  - f. UPT Perbengkelan Kapal
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan.

## **I.2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut;
4. Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan Daerah.

## **I.3 Isu – isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
2. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas
3. Rendahnya fasilitas pelayanan dan kebijakan parkir kendaraan
4. Kurangnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan. Sehingga banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat
6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Kendaraan taat Uji Kir

#### I.4 Keadaan Pegawai

Pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

**Tabel I. 1** Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2023

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Pejabat Eselon II	1	Orang
Pejabat Eselon III	3	Orang
Pejabat Eselon IV	13	Orang
Jabatan Fungsional	2	Orang
Staff	20	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>Orang</b>

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

**Tabel I. 2** Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2023

<b>Golongan/</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Golongan IV. b	1	Orang
Golongan IV. a	5	Orang
Golongan III. d	7	Orang
Golongan III. c	6	Orang
Golongan III. b	3	Orang
Golongan III. a	8	Orang
Golongan II. d	3	Orang

Golongan II. c	4	Orang
Golongan II. b	1	Orang
Golongan II. a	1	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>Orang</b>

c. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel I. 3** Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2023

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
S2	4	Orang
S1	19	Orang
D4	5	Orang
D3	6	Orang
D2	1	Orang
SMA/SMK/MA	4	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>Orang</b>

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- S1 = 13 Orang
- D4 = 2 Orang
- D2 = 1 Orang

- SMA = 76 Orang
- Jumlah = 92 Orang**

## **I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

### **a. Gedung Kantor**

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten batu bara terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara -21254. Gedung Kantor Dinas Perhubungan terdiri dari:

- Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat, dan Bidang Umum Kepegawaian dan Ruang Rapat menempati gedung yang berada di tengah (gedung utama kantor).
- Ruang kerja Bidang Prasarana dan keselamatan, Aset, Ruang Bidang Keuangan dan Program dan Musholla menempati gedung sebelah kanan gedung utama.
- Ruang kerja Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan angkutan, Tempat Parkir, Ruang reperasi perlengkapan jalan menempati gedung sebelah kiri gedung utama

### **b. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- UPT Pengujian kendaraan Bermotor terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
- UPT perbengkelan Kapal terletak di Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Tiram
- Kantor UPT Terminal terletak di Labuhan Ruku Kecamatan Talawi

### **c. Kendaraan Dinas**

- unit Mobil Dinas Kepala Dinas.
- unit Mobil Dinas Sekretaris Dinas
- 1 unit double cabin untuk Operasional Patwal
- 1 unit mobil pick-up untuk Pemeliharaan Rambu, Marka dan Lampu Lalu Lintas
- Unit bus perintis
- Unit Bus Eksekutif yang digunakan untuk Kepentingan – Kepentingan tertentu guna meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan yang menunjang urusan pemerintah Kabupaten Batu Bara

- 2 Unit Kendaraan Operasional roda dua yang di gunakan untuk pengawalan dan operasi pelayanan di lingkungan Kabupaten Batu Bara

**d. Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan**

**Tabel I. 4** Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

No.	Uraian	Kebutuhan	Kondisi 2023	Keterangan
1.	Ruang rapat	2	1	
2.	Tempat Parkir	3	2	
3.	Ruang reparasi perlengkapan jalan	1	1	Ruangan tidak memadai dan terlalu sempit
4.	Tempat penyimpanan sapras rambu	1	-	Belum ada ruang yang khusus untuk penyimpanan
5.	Ruang Dharmawanita	1	-	
6.	Kendaraan roda 4	10	15	Belum ada mobil untuk keperluan operasional sekretariat, belum adanya mobil Crane untuk perbaikan LPJU dan kurangnya jumlah bus perintis
7.	Kendaraan roda 2 patwal	4	2	

## I.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.456.939.848,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

Belanja operasi dan Belanja Modal yang berasal dari APBD sebesar Rp. 12.456.939.848,- yang didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan serta 35 sub.kegiatan.

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel I. 5** Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Jenis Belanja / Program	Anggaran DPPA (Rp.)
PENDAPATAN	354.000.000
BELANJA DAERAH	12.456.939.848
BELANJA OPERASI	8.792.252.848
BELANJA MODAL	3.664.687.000
I. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,006,323,940
II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,275,110,908
III. Program Pengelola Pelayaran	175,505,000

## **I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### **3.2. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

# Perencanaan & Perjanjian Kinerja

---

### II.1 Perencanaan Strategis

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program / kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh.

Renstra merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan dan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

**a. Visi dan Misi**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yaitu:

**Tabel II. 1** Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Batu Bara 2019-2023

<b>VI si</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	<b>Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah Atas Pelayanan Publik Dan Investasi.</b>	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kab. Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
		Terwujudnya peningkatan	Meningkatnya Nilai Investasi

VI si	Misi	Tujua n	Sasaran
		investasi	Daerah
2	<b>Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.</b>	Terciptanya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Terkendalinya Penataan Ruang dan Penciptaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Industri	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri
3	<b>Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya.</b>	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan
			Meningkatnya Pendapatan Daerah
4	<b>Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara</b>	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan

<b>VI si</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
5	<b>Meningkatnya pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan Teknologi Berkembang</b>	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja
6	<b>Meningkatkan Kolaborasi Industri, Lembaga Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara</b>	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah
7	<b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Spiritual Masyarakat</b>	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
8	<b>Meningkatkan peran sertaseluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara</b>	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Sumber: Peraturan Bupati No. 109 Tahun 2022

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung misi ke dua dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan dan indikator capaian sasaran Meningkatkan Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara**

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor

penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur.
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	3	4	3	5	8
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip	%	C	B	B	BB	BB

### c. Strategi Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan

daerah yang telah ditetapkan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel II. 3** Strategi, Program dan Kegiatan

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

## II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	10
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76.00)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.010.368.146	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.996.680.167	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	275.505.000	APBD

<b>Total</b>	<b>12.282.553.313</b>	
--------------	-----------------------	--

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya Perubahan DPA Perangkat Daerah tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 5** Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	10
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (75.00)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.006.323.940	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.275.110.908	PAPBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	175.505.000	PAPBD
<b>Total</b>		<b>12.456.939.848</b>	

### **II.3 Rencana Anggaran Tahun 2023**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk tahun 2023 ada 3 program, 14 kegiatan, dan 35 sub. Kegiatan di Dinas Perhubungan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni Pendapatan sebesar Rp. 300.000.000,- dan anggaran Belanja Rp. 12.282.553.313,- dengan rincian Belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 12.282.553.313, Akibat Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 Jumlah anggaran meningkat yaitu Pendapatan menjadi sebesar Rp. 5.461.650.450,- dan anggaran Belanja sebesar Rp. 354.000.000,- dengan rincian Belanja yang dari APBD Rp. 12.456.939.848,-.

## a. Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel II. 6 Target Belanja Dinas Perhubungan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 354.000.000,-	100 %
<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>Belanja Operasi</b>	RP. 8.792.252.848,-	70,58%
<b>Belanja Modal</b>	Rp. 3.664.687.000,-	29,42%

Tabel II. 7 Anggaran Dinas Perhubungan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.006.323.940</b>
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.989.950
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.152.572
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.966.450
Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.256.145

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.251.360.940
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.597.883
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>5.275.110.908</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.311.227.959
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	46.272.619
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	204.788.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	495.722.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	141.224.650
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.875.680
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>175.505.000</b>

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	175.505.000

b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja operasi dan belanja modal Tahun 2023 Dinas Perhubungan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 8** Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.456.939.848	100%	Semua program dan Kegiatan dialokasikan untuk sasaran strategis
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah			

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III. 1** Skala Nilai Pringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	75 - 89,99	Tinggi	
3	65 - 74,99	Sedang	
4	50 - 64,99	Rendah	
5	0 - 49,99	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### III.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019- 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III. 2** Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
<b>Misi:</b>					
<b>1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi</b>					
<b>2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Pertumbuhan Industri dan Perekonomian Masyarakat</b>					
1	Persentase Penurunan Angka Kecelekaan	%	10	10	100%
2	Nilai AKIP	Nilai	BB (75.00)	BB (72.06)	96.08%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 98.04%.

### III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan

kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel III. 3** Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Misi:																	
1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi																	
2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Pertumbuhan Industri dan Perekonomian Masyarakat																	
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	20%	20%	100%	25%	14%	56%	30%	3%	11%	5%	33%	651%	10%	10%	100%
2	Nilai AKIP	%				B (66.88)	B (66.88)	100%	B (70)	BB (71.14)	102%	BB (73.00)	BB (73.54)	100,74%	(BB) 75.00	(BB) 72.06	96.08

**Sasaran Strategis**

1. Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

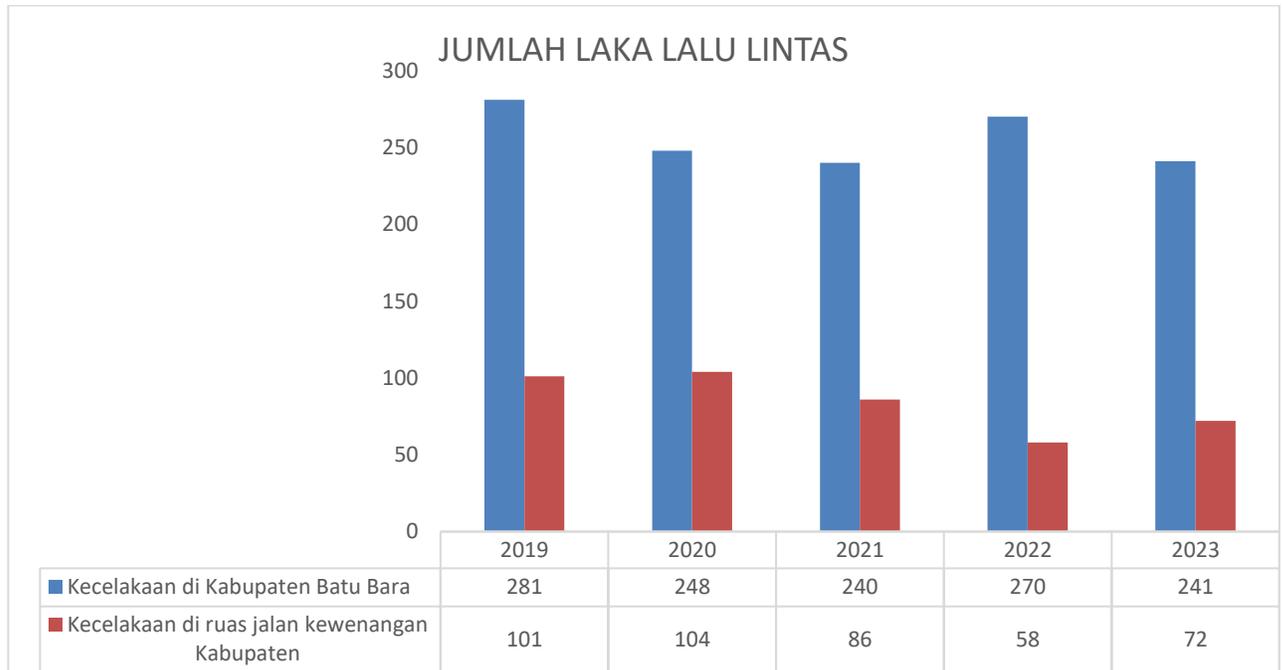
**Tabel III. 4** Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penurunan kecelakaan lalu Lintas	-12.5	10.00	10.74	107,40	10.00	107,40

Perhitungan Persentase Penurunan Angka Kecelakaan di kabupaten Batu Bara di peroleh dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kecelakaan tahun } (n-1) - \text{Jumlah kecelakaan tahun } (n)}{\text{Jumlah Kecelakaan tahun } (n-1)} \times 100\% \\
 &= \frac{270-241}{270} \times 100\% \\
 &= 10,74\%
 \end{aligned}$$

**Gambar III. 1** Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023



Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2023 yaitu penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Batu Bara sebesar 10.74%. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort yang tersebar di 12 Kecamatan pada Kabupaten Batu Bara diperoleh data bahwa jumlah kecelakaan di Kabupaten Batu Bara sebanyak 270 kejadian di tahun 2022 sedangkan di tahun 2023 terjadi kecelakaan sebanyak 241. Pada tahun 2023 jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan.

Adapun permasalahan dan solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas
3. Belum optimalnya prasarana keselamatan lalu lintas
4. Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan. Keriteria yang digunakan adalah usia kendaraan dan kendaraan laik jalan.

Solusi :

1. Rehabilitasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum dengan pengoprasian Bus Perintis Dinas Perhubungan
2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu lintas
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir
4. Melaksanakan pam insidentil dalam rangka pengamanan lalulintas pada event tertentu
5. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, deliniator dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU.
6. Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait standar pelayanan angkutan umum kepada penyelenggara angkutan umum. Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan kartu pengawasan untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar minimal armada angkutan ketika armada tersebut tidak layak beroperasi. Penilaian yang digunakan adalah adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Pehubungan yang menyatakan bahwa kendaraan laik jalan dan usia kendaran.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
2. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
  - penyuluhan langsung,
  - siaran radio ( siaran langsung maupun Iklan Layanan Masyarakat)
  - spanduk, poster, leaflet, stiker, website;
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Batu Bara;

4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, Deliniator) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;
5. Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya keselamatan transportasi. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator:
  - a. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, target 100% tercapai 100%
  - b. Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten, target sebesar 50% tercapai sebesar 62.64%
  - c. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, target sebesar 41% tercapai 75%

program ini didukung kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.311.227.959,- terealisasi Rp4.263.216.613,- atau sebesar 98.89%.

**Tabel III. 5 Database Sarana dan Prasara Jalan Kabupaten**

No	Nama Rambu	2019	2020	2021	2022	2023
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Total Rambu dan Deliniator	929	929	1129	1325	1325
2	Total RPPJ tiang pendek	14	14	14	14	14
3	Total RPPJ tiang tinggi	57	57	57	57	57
4	Total papan himbauan	25	25	25	25	23
5	Total Halte	20	20	20	20	17
6	Total Warning light	22	24	36	36	19
7	Total Rambu Plank Nama Jalan	31	31	31	31	31
8	Total LPJU(Lampu Penerangan Jalan Umum)	0	78	238	238	2.082

9	Total Lampu Sorot	0	0	0	0	18
10	Total Traffic Light	0	0	4	4	4
11	Total Portal	0	4	11	11	13
<b>Total Keseluruhan Rambu</b>		<b>1.098</b>	<b>1.182</b>	<b>1.565</b>	<b>1.761</b>	<b>3.603</b>
<b>Total Kebutuhan Rambu-Rambu</b>		<b>5.000</b>				

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Maksud dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 700 Unit dan Lampu sorot 10 Unit. Tujuan sub kegiatan ini adalah terciptanya Jalan yang terang untuk mengurangi tindakan kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp3.714.600.100,- dan terealisasi sebesar Rp3.687.036.000,- atau sebesar 99,26%. Adapun pemasangan lampu dilakukan di seluruh lingkungan Kabupaten batu Bara.
  - a. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 700 unit
  - b. Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu sorot terpasang 5 unit

**Gambar III. 2** Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Sorot



2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas dan Speed Bump. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp305.000.000,- dan terealisasi Rp304.102.000,- atau sebesar 99,71%.Pemasangan perlengkapan jalan pada sub kegiatan ini terdiri dari :

- a. Jumlah Rambu – Rambu Lalu Lintas 70 unit
- b. Jumlah Pemasangan Speed Bump 100 Meter

**Gambar III. 3** Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas dan Speed Bump

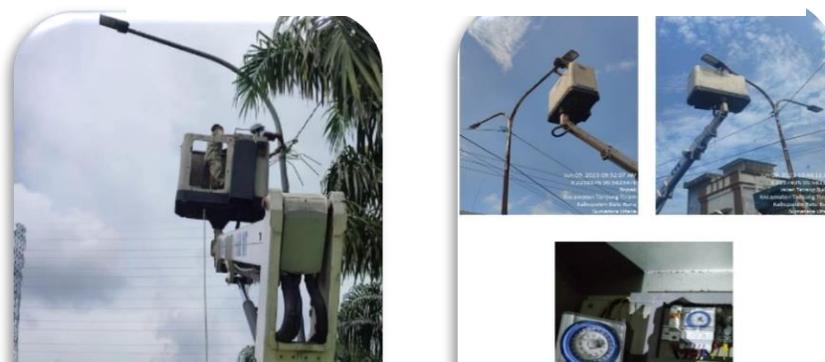


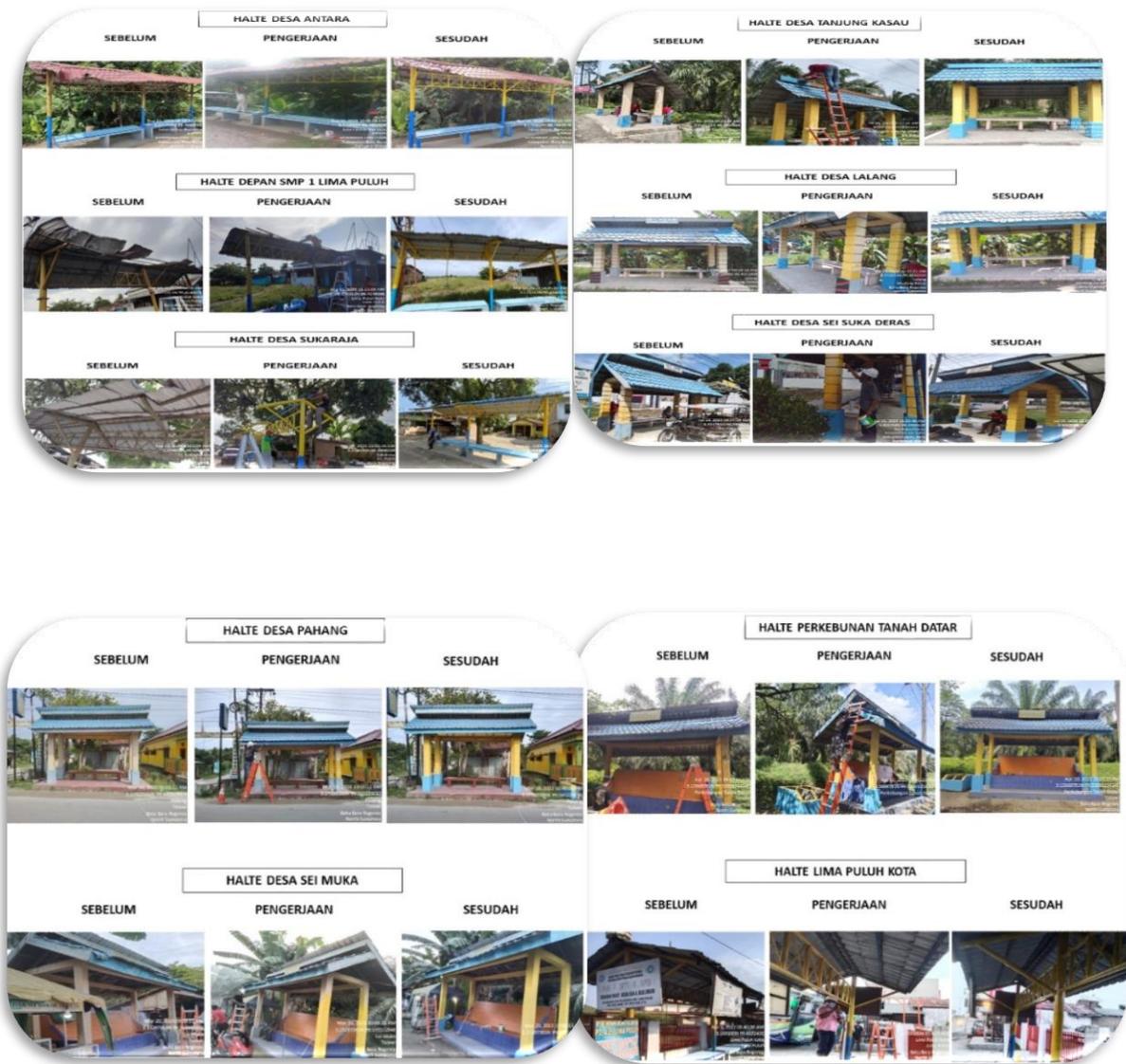
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Prasarana jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan LPJU, rehabilitasi tiang LPJU, penggantian armatur dan pemeliharaan LPJU. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp147.850.000,- terealisasi sebesar Rp140.066.753,- atau sebesar 94,74%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan Halte dengan volume pekerjaan sebanyak 70 unit LPJU.

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan halte 10 unit
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 70 unit

**Gambar III. 4** Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan





4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  
 Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas, pemeliharaan warning light, rehabilitasi papan himbauan dan RPPJ. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp143.777.859,- terealisasi sebesar Rp132.011.860,- atau sebesar 91,82%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya perlengkapan jalan yang ada di wilayah

Kabupaten Batu Bara dengan volume pekerjaan sebanyak 100 unit Rambu – rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya.

**Gambar III. 5** Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan



a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Parkir Kewenangan Kabupaten Batu Bara. Tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan PAD Retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten batu bara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp46.272.619,- terealisasi Rp44.562.500,- atau sebesar 96.30%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Isub kegiatan yaitu :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pengengawasan parkir yang di adakan setiap bulanya dan sosialisasi parkir dengan peserta 50 orang. Rp46.272.619,- terealisasi Rp44.562.500,- atau sebesar 96.30%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya PAD parkir dari tahun – tahun sebelumnya.

**Gambar III. 6** Pengawasan dan Sosialisasi Parkir



2) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor dengan adanya uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan di pengujian kendaraan bermotor. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor dengan meningkatkan keselamatan berlalu lintas dari sarana atau kendaraan khususnya kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. Kegiatan dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp204.788.000,- dan terealisasi sebesar Rp175.158.000,- atau sebesar 85.53%. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di kabupaten Batu Bara

**Tabel III. 6** Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di kabupaten Batu Bara

JENIS	JUMLAH UJI KIR				
	2019	2020	2021	2022	2023
Uji Kir kendaraan umum	N/A	165	485	2227	3005

5. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu pengadaan Toolkit 1 set, wearpack safety 3 unit, Alat uji kedalaman alur ban 1 unit, Alat uji sound level 1 unit, alat uji tint tester 1 unit.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp21.273.000,- dan terealisasi sebesar Rp21.273.000,- atau sebesar 100%.

**Gambar III. 7** Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB



6. Sub kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kendaraan dengan pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Batu Bara. Sub Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp31.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp11.885.000,- atau sebesar 38.32%. Hal ini disebabkan anggaran di Triwulan III dan IV tidak dapat di realisasikan karena ketersediaan dana Kas daerah namun kegiatan tetap di laksanakan.

7. Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah penyediaan Smart card PKB 4.000 lembar, Sub Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,- atau sebesar 100%.

**Gambar III. 8** Penyediaan Bukti Lulus Uji PKB



8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat PKB agar dapat berfungsi sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji yang terdiri dari smoke tester, gas analyzer, , head light tester, side slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound level meter, tint tester dan kedalaman alur ban. Sub

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp52.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp45.000.000,- atau sebesar 80,00%.

**Gambar III. 9** Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB



b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan memberikan pelayanan pengamanan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah upaya peningkatan keselamatan berlalu dalam berlalulintas, pengembangan manajemen rekayasa lalulintas dan pengembangan perekayasaan lalulintas. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp495.722.000,- dan terealisasi sebesar Rp445.256.000,- atau sebesar 89.82%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan cara pengamanan lalulintas oleh personil pengatur lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara di persimpangan jalan dan titik – titik berkumpulnya masyarakat seperti tempat perbelanjaan dan kegiatan – kegiatan pimpinan. Tujuan sub kegiatan ini adalah peningkatan keselamatan lalu lintas dan

mengurangi titik kemacetan di Kabupaten Batu Bara. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp163.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp118.726.000,- atau sebesar 72.62%.

**Gambar III. 10** Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas



2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas lalu lintas. Tujuan sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru serta hari – hari besar lainnya. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp332.222.000,- dan terealisasi sebesar Rp326.530.000,- atau sebesar 98,29%.

**Gambar III. 11** Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar



c. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan dan rekomendasi andalalin guna menganalisis kondisi lalu lintas yang ada saat ini dan dalam waktu hingga 5 tahun ke depan yang merupakan dampak dari bangunan atau tempat-tempat tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan rekomendasi andalalin. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp141.224.650,- dan terealisasi sebesar Rp31.800.000,- atau sebesar 22.52%. Hal ini disebabkan anggaran untuk pengawasan dan rekomendasi andalalin Kantor Bupati Batu Bara tidak dapat di realisasikan karena ketersediaan dana Kas daerah namun kegiatan tetap di laksanakan di tahun 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Output dari sub kegiatan ini adalah 1 Doumen Rekomendasi Andalalin.

d. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan dan survey lalu lintas guna perencanaan angkutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan studi pelayanan angkutan dan survey angkutan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp75.875.680,- dan terealisasi sebesar Rp32.195.000,- atau sebesar 42.43%. Hal ini disebabkan analisis data base pelayanan angkutan dan survey lalu lint tidak dapat di realisasikan karena ketersediaan dana Kas daerah namun kegiatan tetap di laksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan dokumen survey angkutan yang terdiri dari Laporan data data base angkutan 1 dokumen dan laporan survey Volume Harian Rata -rata (LHR).

2. Program Pengelola Pelayaran dengan indikator:

- 1) Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, target sebesar 41% tercapai 75% program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan di perairan seperti Survey Alur pendataan Kapal 0 Gt dan pengawalan pejabat dalam pelaksanaan perjalanan ke Pulau Pandang dan Pulau Salah Nama. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp175.505.000,- dan terealisasi sebesar Rp129.505.000,- atau sebesar 73.79%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan survey alur dan dokumen Kapal 0 Gt.

Gambar III. 12 Kegiatan di Perairan



## 2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel III. 7** Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai AKIP	100.74	(BB) 75.00	(BB) 72.06	96.08	(BB) 75.00	96.08

Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target yang direncanakan/ diperjanjikan dengan persentase capaian indikator 96.08% Yang mana pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diharapkan nantinya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara meningkat menjadi 75.00 (BB) setelah sebelumnya pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara memperoleh Nilai Akip sebesar 73.54 (BB). Jika dibandingkan dengan Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah mengalami penurunan 1.46%. Hal ini disebabkan beberapa hal yang menjadi kelamahan dokumen SAKIP Dinas Perhubungan saat dilakukannya Reviu di antaranya tidak di lakukannya publikasi atas produk - produk Dinas Perhubungan yang dikarenakan adanya masalah pada Website Dinas Perhubungan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel Berikut

**Tabel III. 8** Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

No	Kriteria	Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi AKIP			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26.20	27.43	23.80	24.0
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	17.19	14.44	22.95	21.9
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9.05	10.34	9.53	10.1

4.	Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4.64	4.64	17.25	16.6
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20,00	9.80	10.30	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>66.88</b>	<b>71.14</b>	<b>73.54</b>	<b>72.6</b>

*Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara*

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara agar dilakukan perbaikan terhadap upaya peningkatan nilai AKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (crosscutting)
- Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja pada website OPD

2. Pengukuran Kinerja

- Membuat SOP pengumpulan data kinerja
- Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
- Mengimplementasikan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Mendokumentasikan perubahan aktivitas dalam perubahan rencana aksi

3. Pelaporan Kinerja

- Mempublikasikan Laporan Kinerja pada website OPD
- Mepedomani PermenpanRB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah dalam pembuatan Laporan Kinerja;
- Mencantumkan dalam laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah;
- Mecantumkan dalam laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja):
- Mencantumkan dalam laporan kinerja efesiensi atas penggunaan sumber daya maupun efesiensi pengguna anggaran;
- Mencantumkan dalam laporan kinerja upaya perbaikan intuk penyempurnaan kinerja;
- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

4. Evaluai Akuntabilitas Kinerja Internal

- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil akuntabilitas kinerja
- Memanfaatkan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja

Kemudian untuk mewujudkan kinerja sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dicapai melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Yang mana melalui program dan kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian outcome yang direncanakan bahwa untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu dipenuhi dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan OPD antara lain sebagai berikut:

- Pohon Kinerja/ cascading kinerja dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV;
- Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD dan IKU;
- Rencana Kerja (Renja);
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD;
- Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan tingkat eselon IV;
- Rencana Aksi dan laporan evaluasi kinerja triwulanan;
- Laporan Kinerja

### III.2 Akuntabilitas Keuangan

#### a. Realisasi Anggaran

**Tabel III. 9** Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 354.000.000,-	Rp. 394.456.000	111.42%
<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>Belanja Operasi</b>	RP. 8.792.252.848,-	Rp. 8.103.400.666	92,16%
<b>Belanja Modal</b>	Rp. 3.664.687.000,-.	Rp. 3.650.924.750	99,62%
<b>Jumlah</b>	Rp. 12.102.939.848,-.	Rp. 11.359.869.416	93,86%

Penyerapan anggaran belanja Operasi pada tahun 2023 sebesar 92,16% dari total anggaran yang dialokasikan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Jenis Belanja / Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
BELANJA DAERAH	12.456.939.848	11.754.325.416	94,35
BELANJA OPERASI	8.792.252.848	8.103.400.666	92,16
BELANJA MODAL	3.664.687.000	3.650.924.750	99,62
I. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,006,323,940	6.634.164.743	94,69
II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,275,110,908	4.992.188.113	94,64
III. Program Pengelola Pelayaran	175,505,000	129.505.000	73,79

### 3.3.2. Realisasi Pendapatan

Salah satu penggerak keuangan daerah adalah daerah yang bersangkutan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, ketentuan perundang-undangan menetapkan pokok-pokok kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang prima di utamakan prinsip partisipasi yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan melalui proses temu publik, dialog dan konsultan.

Adapun Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara target PAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	PAD Dinas Perhubungan	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	234.000.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000
<b>Total</b>		<b>354.000.000</b>

Dan realisasi PAD untuk semua jenis pelayanan adalah sebagai berikut:

No	PAD Dinas Perhubungan	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	123.803.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	270.650.000
<b>Total</b>		<b>394.456.000</b>

Adapun permasalahan secara umum dalam Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah :

- Kurangnya Pengawasan dari Petugas dan adanya pemungutan parkir liar oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Tingginya Target yang di tetapkan tanpa mempertimbangkan titik parkir yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Persentase Penurunan Angka Kecelakaan dari sasaran Menurunnya Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor telah memenuhi target yang ditetapkan.
2. Indikator Kinerja utama Nilai AKIP dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah tidak memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
3. Tiga (3) Indikator Program yang mendukung indikator kinerja utama telah memenuhi target dari yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui;
- c. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Batu Bara;
- d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, Deliniator) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan perbaikan jalan.